BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Inisiasi pengembangan objek wisata Sumber Maron dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), berfokus pada pemeliharaan kebersihan, keamanan, serta citra wisata yang baik melalui petugas khusus dan kolaborasi polsek dan koramil. Pemerintah Desa menunjukan peran yang cukup kuat dalam aspek aksesibilitas dan dukungan finansial, serta fasilitas dasar sudah relatif mendukung aktivitas wisatawan. Namun, dalam aspek promosi, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengembangan sumber daya manusia, peran pemerintah desa masih cenderung bersifat pasif dan terbatas, potensi wisata belum sepenuhnya dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Faktor penghambat utama meliputi kurangnya inisiatif promosi yang aktif dan ketergantungan penuh kepada BUMDes, kondisi jalan yang masih sempit disertai minimnya dukungan masyarakat untuk pelebaran, kesulitan pelaksanaan pelatihan dan peran masyarakat yang terbatas, serta sikap tertutup terhadap kemitraan eksternal seperti investor atau sektor swasta. Keterbatasan ini membuat pengembangan wisata lebih berorientasi pada pengelolaan aset dan dana internal desa, akses modal tambahan, inovasi fasilitas, dan penguatan kapasitas belum berkembang seiring potensi pasar wisata. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma peran pemerintah desa menjadi fasilitator aktif yang mendorong promosi digital, peningkatan kapasitas SDM, pelebaran akses

jalan dengan partisipasi masyarakat, serta kemitraan selektif dengan pihak luar, agar pengembangan Wisata Air Sumber Maron berjalan lebih berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Desa Karangsuko.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran yang dibutuhkan berdasarkan hasil penelitian penulis selama melaksanakan penelitian tentang "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Wisata "yakni Pemerintah Desa Karangsuko disarankan untuk menjadi fasilitator aktif dalam pengembangan Wisata Air Sumber Maron, bukan hanya penyedia modal dan penasihat. Salah satu saran utama adalah membentuk kerangka promosi wisata resmi desa, dengan solusi: membentuk tim kecil promosi melibatkan perangkat desa, BUMDes, dan perwakilan UMKM, mengembangkan akun media sosial aktif (Instagram, Facebook, TikTok) yang rutin mengunggah konten, membuat materi promosi sederhana untuk digunakan di media sosial dan di jalur akses wisata serta menggandeng pelajar, mahasiswa, atau komunitas lokal untuk membantu pembuatan konten.

Untuk BUMDes, disarankan memperkuat peran sebagai pengelola profesional melalui pelatihan rutin 3–6 bulan sekali bagi pengelola, petugas kebersihan, dan pelaku UMKM, mengalokasikan sebagian pendapatan untuk perawatan fasilitas, dan menempatkan petugas kebersihan secara bergantian agar destinasi tetap bersih dan nyaman.

Pemerintah Desa dan BUMDes perlu membuka ruang kemitraan selektif dengan pihak eksternal untuk mengimbangi keterbatasan dana internal. Saran dari peneliti adalah membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga akademisi. Solusinya dapat berupa mengajukan proposal ke dinas pariwisata setempat untuk bantuan pelatihan, alat promosi, atau fasilitas pendukung, menjalin kemitraan dengan pemilik usaha di luar desa misalnya fotografer, penyedia transportasi, komunitas wisata, untuk paket wisata kolaboratif dan menggandeng kampus atau pelajar untuk program magang, survey wisatawan, atau pelatihan digital marketing. Dengan langkah-langkah konkret ini, pengembangan Wisata Air Sumber Maron diharapkan berjalan lebih berkelanjutan, berdaya saing, dan dapat mendongkrak pendapatan serta kesejahteraan masyarakat Desa Karangsuko.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas lokasi penelitian, menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, melibatkan survei wisatawan, dan memantau pengembangan wisata dalam jangka waktu lebih panjang agar hasil lebih komprehensif dan representatif.